

RENCANA STRATEGIS BALAI VETERINER BUKITTINGGI TAHUN 2015 – 2019



RENCANA STRATEGIS

BALAI VETERINER BUKITTINGGI

TAHUN 2015 – 2019



BALAI VETERINER BUKITTINGGI
DIREKTORAT JENDRAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2015

Ucapan Terima Kasih

Diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para kepala seksi, kepala Laboratorium dan staf BPPV Regional II Bukittinggi dalam rangka persiapan dan penyusunan Rencana Strategis Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi

:

1. Drh Azfirman
2. Drh Eliyus Putra
3. Drh Rudi Harso Nugroho
4. Drh Yulfitria
5. Drh Yuli Miswati Msi
6. Drh Lilian
7. Drh I Gde Eka Budhiyadnya
8. Drh Cut Irzamiati
9. Drh Budi Santosa
10. Drh Helmi
11. Drh Rina Hartini
12. Drh Dwi Inarsih
13. Drh R Katamtama Anindita
14. Wilna Sri SH
15. Ristion Piliang SH
16. Sri Winarti
17. Syofina Latif
18. Samsi Hadipranoto A.Md
19. Desmira V Mudaris
20. Zulkifli
21. Daniel Faizal
22. Noviarti
23. Rina A.Md

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadarat Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya Rencana Strategis Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2015 – 2019. Proses penyusunan Renstra diawali dengan penjarangan isu, eksternal dan internal, yang ditenggarai secara langsung mempengaruhi pencapaian hasil (outcomes) dan keluaran (output) pelaksanaan program dan kegiatan. Proses penjarangan isu dilakukan dengan serangkaian focus group discussion (FGD), dengan melibatkan seluruh kepala seksi dan Kepala laboratorium dan beberapa staf Balai Veteriner Bukittinggi.

Topik bahasan dalam focus group discussion terdiri dari 4 topik; (1) Penguatan epidemiologi dan Informasi veteriner, (2) Penguatan laboratorium dalam sarana, metode dan mutu pengujian, (3) Penguatan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Prima, (4) Penguatan Jejaring Kerja dalam penagamanan wilayah dan Pembebasan PHMS prioritas secara bertahap.

Hasil diskusi kelompok disusun menjadi sebuah Renstra Balai Veteriner Bukittinggi memuat bagian-bagian yang saling terkait. Bagian-bagian tersebut adalah : (1) Pendahuluan, (2) Potensi dan Permasalahan, (3) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (4) Arah, Kebijakan dan Strategis, (5) Program dan Kegiatan Balai Veteriner Bukittinggi 2015 – 2019, dan (6) Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

Penyusunan Renstra ini jauh dari sempurna, untuk itu kami mohon masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya.

Bukittinggi, Mei 2015
Kepala Balai Veteriner Bukittinggi

(Drh Azfirman)
NIP. 19651004 199403 100 1

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu Nasional Sebagai Dasar Penyusunan Renstra.....	8
II. GAMBARAN PELAYANAN BPPV REGIONAL II	10
2.1. Wilayah Kerja.....	10
2.2. Hubungan Kerja.....	12
2.3. Situasi Penyakit Hewan di Wilayah Kerja.....	12
2.4. Kemampuan Total.....	12
III. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	14
3.1. Isu Strategis.....	14
3.2. Kondisi yang diharapkan.....	14
3.3. Langkah langkah strategis.....	14
3.4. Sasaran Strategis.....	15
3.5. Hambatan dan Kendala.....	15
3.6. Kondisi yang Mendukung.....	16
IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	19
4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	19
4.2. Visi dan Misi	22
4.3. Tujuan dan Sasaran	22
4.4. Cara Penyampaian Sasaran	22
V. PROGRAM DAN KEGIATAN	24
VI. PENUTUP.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rencana Program dan Kegiatan Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2015-201926

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi negara hampir tidak ada batasnya

Globalisasi ekonomi adalah kehidupan ekonomi global yang bersifat terbuka dan tidak mengenal batas-batas territorial, atau kewilayahan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Disini dunia dianggap sebagai suatu kesatuan yang semua daerah dapat terjangkau dengan cepat dan mudah. Sisi perdagangan dan investaris menuju ke arah liberalisasi kapitalisme sehingga semua orang bebas untuk berusaha dimana saja dan kapan saja didunia ini.

Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan, dimana negara-negara diseluruh dunia menjadi suatu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas territorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal barang dan jasa.

Perdagangan Internasional

Laju perdagangan yang cukup pesat di era global saat ini tidak lagi mengenal batas-batas antar negara (borderless country). Globalisasi perdagangan yang mulai bergulir setelah perundingan perdagangan di bawah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan dilanjutkan dengan terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia (world trade organization/WTO) tidak saja memiliki sisi positif tetapi juga berdampak negatif.

Beberapa sisi negatif dari diberlakukannya era globalisasi adalah meningkatnya risiko penyebaran penyakit hewan dari satu negara ke negara lain atau dari satu benua ke benua lain di seluruh dunia. Berbagai komoditi yang mempunyai potensi membawa agen biologis berbahaya dapat keluar masuk dari satu area ke area lain dan dari satu negara ke negara lain. Jika sistem yang ada tidak mampu mengatur itu semua maka suatu negara dapat hancur karena imbas dari masuknya suatu agen biologis berbahaya.

Perdagangan hewan dan produk asal hewan antar negara layak menjadi perhatian serius setiap negara termasuk Indonesia. Hewan dan produknya merupakan komoditi yang memiliki potensi sebagai pembawa agen biologis berbahaya yang dapat mengancam sebuah negara baik dari aspek kesehatan masyarakat dan lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan citra suatu bangsa di hadapan dunia Internasional.

Perdagangan hewan dan komoditinya memiliki multiplier effect yang harus dicermati secara serius dan ditangani dengan tepat. Untuk itu setiap perdagangan komoditi hewan dan produknya harus dipastikan bahwa komoditi tersebut sehat (bebas dari penyakit) dan aman bagi negara tujuan.

Untuk mencegah masuknya komoditi yang berbahaya dari negara yang satu ke negara yang lain sebenarnya telah diatur oleh world trade organisation (WTO) dengan aturan Sanitary and Phytosanitary-nya (SPS). SPS merupakan tools (alat) bagi suatu negara untuk melindungi diri dari ancaman agen penyakit bersumber hewan dari negara lain dalam perdagangan antar negara. Jadi SPS dapat dijadikan alasan bagi suatu negara menolak suatu komoditi dari negara lain jika negara eksportir tidak dapat memenuhi aturan dalam SPS.

Perdagangan komoditi hewan dan produknya antar negara juga dapat memicu transboundary disease (penyakit yang ditularkan dari satu negara ke negara lain melalui jalur perdagangan) seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), sapi gila (BSE), rinderpest, classical swine fever, dan flu burung (AI).

Risiko inilah yang terjadi jika proses penanganan dalam perdagangan komoditi hewan tidak dilakukan dengan tidak tepat. Jika kita tidak menangani hal ini dengan baik maka alih-alih perdagangan antar negara menguntungkan bagi kita tetapi justru yang terjadi ancaman bagi bangsa ini.

Multiplier Effect Penyakit Hewan

Kita dihadapkan pada kenyataan bahwa penyakit hewan memiliki multiplier effect yang luas. Mulai dari kerugian secara ekonomi, kesehatan masyarakat, dan lingkungan, sosial budaya, dan posisi suatu negara di hadapan dunia Internasional. Indonesia sudah merasakan efek dari penanganan yang tidak tepat dalam penyelesaian flu burung (AI). Selain kerugian ekonomi Indonesia juga mendapat sorotan tajam dari dunia Internasional akibat penanganan yang tidak tepat dalam penyelesaian flu burung.

Kita dapat melihat beberapa negara yang menderita kerugian ekonomi akibat penyakit bersumber hewan di antaranya Inggris harus mengeluarkan dana sebesar Rp 93 triliun akibat foot and mouth disease (penyakit mulut dan kuku/PMK). Akibat penyakit yang sama, pada tahun 2001 giliran Brasil menderita kerugian sebesar Rp 2,7 triliun dan Argentina Rp 5,4 triliun pada tahun 2005. Negara adidaya seperti Amerika Serikat saja setiap tahunnya harus menggelontorkan uang tiga sampai enam miliar dolar Amerika akibat penyakit hewan. Bagaimana dengan Indonesia? Kita bisa belajar banyak dari kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) dan flu burung. Untuk membebaskan Indonesia dari PMK diperlukan waktu 100 tahun dan konon total kerugian mencapai Rp 11 triliun. Sementara akibat flu burung saja Indonesia menderita kerugian tidak kurang dari Rp 4,1 triliun. Sebuah angka yang fantastis bagi suatu negara dengan kondisi perekonomian yang masih tertatih-tatih.

Belum lagi kerugian akibat penyakit hewan lainnya yang tentunya semakin memberatkan anggaran negara ini. Hal ini amat disayangkan di tengah-tengah masyarakat yang sebagian besar ekonominya lemah dan gizi buruk serta kelaparan terjadi di beberapa wilayah di negeri ini.

Tentunya kondisi ini tidak akan terjadi jika segenap komponen bangsa ini benar-benar serius dalam mengatasi penyebaran dan ancaman penyakit hewan. Padahal kalau kita dapat mengendalikan flu burung dan penyakit hewan lainnya dengan baik maka kita tidak perlu menggelontorkan dana sebesar itu dan tentunya akan lebih bermanfaat jika dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Imbas bagi kesehatan manusia juga harus mendapat perhatian yang serius. Keberadaan zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya) terus menjadi ancaman dunia.

Saat ini Indonesia masih menempati urutan pertama jumlah korban manusia akibat flu burung. Belum lagi korban manusia akibat zoonosis lainnya seperti rabies yang mencapai 100 orang lebih tiap tahunnya. Kalau kita lihat data yang disampaikan oleh Brown (2004) bahwa dalam dua dekade terakhir 75% penyakit baru (emerging disease) yang menyerang manusia

berasal dari agen penyakit yang menyerang hewan (zoonosis). Fakta yang ada memaksa kita harus serius menangani penyakit bersumber hewan.

Saat ini ancaman pandemi influenza akibat tidak terkendalikannya flu burung dengan baik terus menjadi ancaman bagi keamanan dan keberadaan manusia di bumi ini. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan manusia di dunia. Dunia beraducepat dengan perkembangan agen penyakit asal hewan yang dapat mengancam keberadaan manusia di dunia.

Bahkan saat ini beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab telah memanfaatkan agen penyakit asal hewan yang mematikan (misal bakteri *Bacillus anthracis*) ini sebagai senjata biologis (bioterrorism). Besarnya imbas yang dihadirkan oleh senjata biologis ini kembali menyita perhatian dunia Internasional.

Efek penyakit hewan juga ternyata menyentuh aspek sosial budaya. Contoh yang nyata dialami oleh bangsa kita adalah pada kasus flu burung. Kita bisa melihat reaksi masyarakat Karo pada saat cluster flu burung di Karo. Kita juga bisa melihat reaksi masyarakat Bali dalam menyikapi kasus flu burung.

Semuanya berimbas pada aspek sosial budaya masing-masing daerah. Sementara terhadap posisi Indonesia di mata dunia Internasional tidak ada yang menyangsikan bahwa akibat belum optimalnya Indonesia dalam meredam penyebaran flu burung maka Indonesia terus mendapat sorotan tajam dari dunia Internasional.

Beberapa hal yang dipaparkan diatas merupakan multiplier effect dari penyakit hewan. Efek tersebut masih dapat berkembang lebih jauh dan menyentuh ke berbagai sendi kehidupan lainnya jika penanganan terhadap penyakit hewan tidak dilakukan secara serius.

Sistem Karantina Hewan yang Tangguh

Aktivitas perdagangan antar negara (internasional) yang semakin pesat memiliki potensi menghadirkan transboundary disease. Hal ini juga dapat menghadirkan beberapa penyakit hewan yang exotic di Indonesia. Keberadaan Avian influenza (flu burung) di Indonesia diduga kuat sebagai dampak negatif dari perdagangan antar negara yang terjadi. Belajar dari kemungkinan tersebut maka sudah seharusnya kita memperketat dan memperkuat penjagaan terhadap pintu masuk perdagangan antar negara di Indonesia. Hal ini sangat disadari oleh negara-negara maju dan mereka benar-benar memfokuskan diri pada tindakan pengawasan area perbatasan (pintu masuk) dari ancaman masuknya agen penyakit asal hewan yang dapat menebar ancaman bagi keutuhan negara tersebut.

Untuk itu kita harus memperkuat sistem karantina hewan yang bertugas di pintu masuk wilayah NKRI. Kalau kita lihat peraturan yang ada yaitu UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dinyatakan bahwa salah satu tujuan karantina hewan adalah mencegah masuknya hama dan penyakit hewan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam mencegah masuknya agen penyakit asal hewan dari Negara lain ke wilayah NKRI maka karantina hewan memiliki peran yang sangat strategis. Keberadaan karantina hewan tidak saja sebatas mencegah masuknya agen

biologis berbahaya yang dibawa hewan dan produknya. Tetapi, lebih jauh adalah upaya ini ditujukan untuk tetap menjaga segenap komponen bangsa Indonesia dari ancaman agen biologis berbahaya ini.

Melihat tantangan yang ada maka sistem karantina hewan yang ada harus mampu memecahkan permasalahan kekinian sejalan dengan semakin pesatnya perdagangan antar area dan antar negara. Dibutuhkan sistem karantina yang kuat dengan ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan fasilitas yang memadai.

Karantina hewan sebagai garda terdepan dalam menangani berbagai komoditi hewan yang berpotensi membawa agen penyakit memiliki tanggung jawab yang tidak mudah. Apalagi Indonesia memiliki ribuan kepulauan yang artinya pintu masuk juga tidak sedikit. Kondisi ini diperberat dengan berbagai keterbatasan mulai dari minimnya sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan pendanaan.

Melihat peran karantina hewan dalam mencegah masuknya agen penyakit asal hewan di negeri ini maka tidak berlebihan jika tanggung jawab yang diemban oleh karantina hewan sama beratnya dengan tanggung jawab TNI dalam menjaga keutuhan NKRI. Pendekatan yang dilakukan karantina hewan tidak saja berorientasi pada pengawasan dan pemeriksaan pada pintu masuk keluarnya barang (entry-exit point). Tetapi, juga berorientasi pada lalu lintas hewan dan produk hewan secara utuh berdasarkan peraturan yang ada.

Keamanan wilayah NKRI dari serangan agen penyakit asal hewan terutama dari negara lain bergantung pada kinerja karantina hewan (karantina pertanian). Pekerjaan yang mulia sekaligus tidak mudah untuk dilakukan. Perlu perencanaan dan strategi yang komprehensif dalam mengamankan wilayah NKRI dari ancaman agen penyakit asal hewan.

Ada beberapa poin penting dalam menciptakan karantina hewan yang tangguh yaitu peningkatan sumber daya manusia (SDM) baik kualitas maupun kuantitas, fasilitas, dan pendanaan, legislasi (peraturan/perundangan), dan kerja sama internasional. Keberadaan SDM dengan kualitas yang memadai mutlak dibutuhkan dalam menciptakan karantina hewan yang tangguh. Peningkatan kualitas tenaga medis (dokter hewan) karantina dan komponen lainnya harus terus dilakukan. Begitu juga dengan keberadaan fasilitas dan pendanaan yang mencukupi. Aturan perkarantina juga harus relevan dengan permasalahan kekinian yang dihadapi. Perlunya akselerasi dengan peraturan dari institusi lain termasuk pemerintah daerah guna mewujudkan suatu sistem karantina hewan yang mampu menjaga keamanan wilayah NKRI dari ancaman agen penyakit asal hewan.

Selain ketiga hal di atas maka yang tidak kalah penting adalah kerja sama dengan dunia Internasional. Kerja sama dengan dunia Internasional memungkinkan kita terus memperbaiki diri guna menyiapkan semua komponen yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan yang ada. Apalagi di era perdagangan antar negara yang semakin pesat. Keempat hal di atas jika dapat dilakukan dengan baik maka impian untuk menciptakan sistem karantina hewan yang tangguh dan mampu memecahkan permasalahan perkarantina (hewan) kekinian dapat terwujud.

(Specific Tariffs) dikenakan sebagai beban tetap atas unit barang yang diimpor. Misalnya \$6 untuk setiap barel minyak). Tariff Valorem (od Valorem Tariffs) adalah pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor (Misalnya, tariff 25 persen atas mobil yang diimpor). Dalam kedua kasus dampak tarif akan meningkatkan biaya pengiriman barang ke suatu negara.

- Subsidi Ekspor

Subsidi ekspor adalah pembayaran sejumlah tertentu kepada perusahaan atau perseorangan yang menjual barang ke luar negeri, seperti tariff, subsidi ekspor dapat berbentuk spesifik (nilai tertentu per unit barang) atau Od Valorem (presentase dari nilai yang diekspor). Jika pemerintah memberikan subsidi ekspor, pengirim akan mengekspor, pengirim akan mengekspor barang sampai batas dimana selisih harga domestic dan harga luar negeri sama dengan nilai subsidi. Dampak dari subsidi ekspor adalah meningkatkan harga dinegara pengekspor sedangkan di negara pengimpor harganya turun.

- Pembatasan Impor

Pembatasan impor (Import Quota) merupakan pembatasan langsung atas jumlah barang yang boleh diimpor. Pembatasan ini biasanya diberlakukan dengan memberikan lisensi kepada beberapa kelompok individu atau perusahaan. Misalnya, Amerika Serikat membatasi impor keju. Hanya perusahaan-perusahaan dagang tertentu yang diizinkan mengimpor keju, masing-masing yang diberikan jatah untuk mengimpor sejumlah tertentu setiap tahun, tak boleh melebihi jumlah maksimal yang telah ditetapkan. Besarnya kuota untuk setiap perusahaan didasarkan pada jumlah keju yang diimpor tahun-tahun sebelumnya.

- Pengekangan Ekspor Sukarela

Bentuk lain dari pembatasan impor adalah pengekangan sukarela (Voluntary Export Restraint), yang juga dikenal dengan kesepakatan pengendalian sukarela (Voluntary Restraint Agreement = ERA). VER adalah suatu pembatasan (Kuota) atas perdagangan yang dikenakan oleh pihak negara pengekspor dan bukan pengimpor. Contoh yang paling dikenal adalah pembatasan atas ekspor mobil ke Amerika Serikat yang dilaksanakan oleh Jepang sejak 1981. VER pada umumnya dilaksanakan atas permintaan negara pengimpor dan disepakati oleh negara pengekspor untuk mencegah pembatasan-pembatasan perdagangan lainnya. VER mempunyai keuntungan-keuntungan politis dan legal yang membuatnya menjadi perangkat kebijakan perdagangan yang lebih disukai dalam beberapa tahun belakangan. Namun dari sudut pandang ekonomi, pengendalian ekspor sukarela persis sama dengan kuota impor dimana lisensi diberikan kepada pemerintah asing dan karena itu sangat mahal bagi negara pengimpor. VER selalu lebih mahal bagi negara pengimpor dibandingkan dengan tariff yang membatasi impor dengan jumlah yang sama. Bedanya apa yang menjadi pendapatan pemerintah dalam tariff menjadi (rent) yang diperoleh pihak asing dalam VER, sehingga VER nyata-nyata mengakibatkan kerugian.

- Persyaratan Kandungan Lokal.

Persyaratan kandungan local (local content requirement) merupakan pengaturan yang mensyaratkan bahwa bagian-bagian tertentu dari unit-unit fisik, seperti kuota impor minyak AS ditahun 1960-an. Dalam kasus lain, persyaratan ditetapkan dalam nilai, yang mensyaratkan pangsa minimum tertentu dalam harga barang berawal dari nilai tambah domestic. Ketentuan

kandungan local telah digunakan secara luas oleh negara berkembang yang beriktir mengalihkan basis manufakturanya dari perakitan kepada pengolahan bahan-bahan antara (intermediate goods). Di amerika serikat rancangan undang-undang kandungan local untuk kendaraan bermotor diajukan tahun 1982 tetapi hingga kini belum diberlakukan.

- Subsidi Kredit Ekspor.

Subsidi kredit ekspor ini semacam subsidi ekspor, hanya saja wujudnya dalam pinjaman yang di subsidi kepada pembeli. Amerika Serikat seperti juga kebanyakan negara, memilki suatu lembaga pemerintah, export-import bank (bank Ekspor-impor) yang diarahkan untuk paling tidak memberikan pinjaman-pinjaman yang disubsidi untuk membantu ekspor.

- Pengendalian Pemerintah (National Procurement)

Pembelian-pembelian oleh pemerintah atau perusahaan-perusahaan yang diatur secara ketat dapat diarahkan pada barang-barang yang diproduksi di dalam negeri meskipun barang-barang tersebut lebih mahal daripada yang diimpor. Contoh yang klasik adalah industry telekomunikasi Eropa. Negara-negara mensyaratkan eropa pada dasarnya bebas berdagang satu sama lain. Namun pembeli-pembeli utama dari peralatan telekonumikasi adalah perusahaan-perusahaan telepon dan di Eropa perusahaan-perusahaan ini hingga kini dimiliki pemerintah, pemasok domestic meskipun jika para pemasok tersebut mengenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemasok-pemasok lain. Akibatnya adalah hanya sedikit perdagangan peralatan komunikasi di Eropa.

- Hambatan-Hambatan Birokrasi (Red Tape Barriers)

Terkadang pemerintah ingin membatasi impor tanpa melakukannya secara formal. Untungnya atau sayangnya, begitu mudah untuk membelitkan standar kesehatan, keamanan, dan prosedur pabean sedemikian rupa sehingga merupakan perintang dalam perdagangan. Contoh klasiknya adalah Surat Keputusan Pemerintah Perancis 1982 yang mengharuskan seluruh alat perekam kaset video melalui jawatan pabean yang kecil di Poltiers yang secara efektif membatasi realiasi sampai jumlah yang relative amat sedikit.

DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Dampak Positif :

1. Produksi global dapat ditingkatkan
2. Meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara.
3. Meluaskan pasar untuk produk dalam negeri.
4. Dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik.
5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.

Dampak Negatif :

1. Karena perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang menjadi lebih bebas, sehingga dapat menghambat pertumbuhan sektor industri.
2. Dapat memperburuk neraca pembayaran.
3. Sektor keuangan semakin tidak stabil.

4. Memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
5. Kecepatan dan percepatan informasi begitu cepat berjalan

PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Perkembangan teknologi informasi memang sudah dirasakan sebagian besar lapisan masyarakat di planet bumi ini. Komputer, faksimile, telepon genggam, siaran televisi yang global serta satelit telah mempercepat aliran informasi menembus batas-batas negara tanpa bisa dihentikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Perkembangan iptek, terutama teknologi informasi (information technology) seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun illegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan. Dampak buruk dari perkembangan “dunia maya” ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. Kemajuan teknologi informasi yang serba digital membawa orang ke dunia bisnis yang revolusioner karena dirasakan lebih mudah, murah, praktis dan dinamis berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, berkembangnya teknologi informasi menimbulkan pula sisi rawan yang gelap sampai tahap mencemaskan dengan kekhawatiran pada perkembangan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang berhubungan dengan “cybercrime” atau kejahatan mayantara. Masalah kejahatan mayantara dewasa ini sepatutnya mendapat perhatian semua pihak secara seksama pada perkembangan teknologi informasi masa depan, karena kejahatan ini termasuk salah satu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bahkan dirasakan pula sebagai serious crime (kejahatan serius) dan transnational crime (kejahatan antar negara) yang selalu mengancam kehidupan warga masyarakat, bangsa dan negara berdaulat. Tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan moderen dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, “perang” informasi sampah, bias informasi, hacker, cracker dan sebagainya.

Salah satu komponen penting yang berperan dalam menjaga Indonesia dari ancaman masuknya material biologis berbahaya adalah pihak karantina hewan. Hal ini sangat beralasan mengingat hewan dan produknya memiliki potensi sebagai pembawa material biologis berbahaya dan hal ini memiliki dampak yang luar biasa. Baik secara ekonomi, kesehatan, maupun sosial budaya.

Jika agen biologis berbahaya asal hewan dapat masuk ke wilayah NKRI maka bukan satu atau dua pulau saja yang terancam. Tetapi, seluruh wilayah NKRI. Ini terlihat dari potensi penyebaran agen penyakit asal hewan yang memiliki pola penyebaran yang berbeda. Selain menyerang hewan agen penyakit ini juga dapat menyerang manusia (zoonosis). Pola ancaman langsung terhadap hewan dan manusia inilah yang terus mengalami perkembangan dan terus menjadi ancaman bagi keamanan hidup manusia.

Beberapa pengaruh lain yang kemungkinan terjadi:

- Transaksi perdagangan begitu tinggi
- Terjadi arus barang (keluar masuk barang kesuatu negara)
- Termasuk terbesar penyakit-penyakit dari Negara lain
- Didalam negeri dituntut perkembangan peternakan dan hasil ternak dan kemandirian
- Termasuk didalamnya isu-isu kesehatan hewan
- Membutuhkan Laboratorium sebagai pengukuhan suatu diagnosa penyakit hewan
- Kemajuan teknologi pengujian yang mutakhir
- Mengimplementasikan input-inputteknologi dan pengembangan surveillans
- BPPV Regional II Bukittinggi berada pada posisi hotspot karena yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka yang menjadikan arus lalu lintas laut terpadat didunia
- Perlu kewaspadaan dini (early warning) terhadap masuknya penyakit eksotik

1.2 Isu-isu Nasional Sebagai Dasar Penyusunan Renstra

1. Renstra Kementan Tahun 2015-2019 memberikan arahan pembangunan pertanian yang industrial,yang unggul berkelanjutan,yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan,nilai tambah,daya saing ekspor dan kesejahteraan petani.
2. Renstra Dirjennak 2015-2019 dengan visi
“Menjadikan Dirjennak yang profesional dalam mewujudkan peternakan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan pemanfaatan sumber daya lokal untuk menyediakan pangan hewani dan keamanannya serta meningkatkan konsentrasi peternak.
3. Renstra Direktorat Kesehatan Hewan dengan visi
“Terwujudnya status kesehatan yang ideal melalui pembangunan kesehatan hewan yang modern,efektif dan efisien.
4. Bertumpu pada visi Balai veteriner Bukittinggi.
“Melalui Penyidikan dan Pengujian Veteriner yang Modern,Mewujudkan Regional II Terjamin Aman Keswan dan Kesmavetnya

Balai Veteriner Bukittinggi adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dalam bidang Laboratorium kesehatan hewan, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No : 457/Kpts/OT.210/8/2001, dimana sejak tanggal 20 Agustus 2001 mempunyai tugas melaksanakan penyidikan penyakit hewan, melakukan pengujian produk asal hewan serta pengamanan produk asal hewan dan disempurnakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner

Dalam menyelenggarakan tugas , Balai Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d. Pelaksanaan surveillan penyakit hewan dan produk hewan;

- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;
- h. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/ atau sertifikasi hasil uji;
- i. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);
- k. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- l. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- m. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- o. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di Regional;
- p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- s. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
- t. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- u. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Veteriner.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BPPV REGIONAL II

2.1 Wilayah Kerja

- Jumlah propinsi / Kab / Kota.

Tabel 2 : Daftar Lokasi dan Target Sampel untuk Prop. Riau

No.	Kategori	Nama Lokasi	Target (sampel)
1.	Kategori 1 dan 2	1. Kota Dumai	200
		2. Kota Pekanbaru	200
		Jumlah	400
2.	Kategori 3	1. Kab. Siak	300
		2. Kab. Kampar	300
		3. Kab. Rokan Hulu	250
		4. Kab. Inhu	250
		5. Kab. Kuansing	250
		6. Kab. Bengkalis	200
		Jumlah	1.550
3.	Kategori 4	1. Kab. Rokan Hilir	200
		2. Kab. Pelalawan	200
		3. Kab. Inhil	200
		Jumlah	600
		Total Prop. Riau	2.550

Tabel 3 : Daftar Lokasi dan Target Sampel untuk Prop. Jambi

No.	Kategori	Nama Lokasi	Target (sampel)
1.	Kategori 3	1. Kab. Bungo	300
		2. Kab. Tebo	300
		3. Kab. Merangin	300
		Jumlah	900
2.	Kategori 4	1. Kota Jambi	150
		2. Kab. Batanghari	200
		3. Kab. Muaro Jambi	200
		4. Kab. Tanjabbar	200
		5. Kab. Tanjabtim	200

		6. Kab. Sarolangun	300
		Jumlah	1.250
		Total Prop. Jambi	2.150

Tabel 4 : Daftar Lokasi dan Target Sampel untuk Prop. Sumbar

No.	Kategori	Nama Lokasi	Target (sampel)
1.	Kategori 1 dan 2	1. Kota Sawahlunto 2. Kab. Dharmasraya 3. Kab. Pasaman Barat	150 250 250
		Jumlah	650
1.	Kategori 3	1. Kab. Pesisir Selatan 2. Kab. Agam 3. Kab. 50 Kota 4. Kab. Solok	250 200 300 150
		Jumlah	900
2.	Kategori 4	1. Kab. Pasaman 2. Kab. Pdg Pariaman 3. Kab. Tanah Datar 4. Kab. Sawahlunto/Sjj 5. Kab. Solok Selatan 6. Kab. Mentawai 7. Kota Padang 8. Kota Bukittinggi 9. Kota Payakumbuh 10. Kota Solok 11. Kota Pd. Panjang 12. Kota Pariaman	150 150 250 200 300 100 150 150 250 250 100 150
		Jumlah	2.300
		Total Prop. Sumbar	3.850

Tabel 5 : Daftar Lokasi dan Target Sampel untuk Prop. Kepri

No.	Kategori	Nama Lokasi	Target (sampel)
1.	Kategori 4	1. Kab. Natuna 2. Kab. Bintan 3. Kab. Lingga 4. Kab. Karimun 5. Kota Tj. Pinang	200 200 100 200 100

	6. Kota Batam	150
Jumlah Prop. Kepri		950
TOTAL TARGET SAMPEL 4 PROPINSI		9.500

- Luas wilayah.

PROPINSI	LUAS WILAYAH (Km2)
1. Sumbar	42.297,30
2. Riau	89.150,15
3. Jambi	53.435,72
4. Kepri	251.000
Total	435.883,17

- Perbatasan.

2.2 Hubungan Kerja

- Direktorat Kesehatan Hewan.
- Disnak Peternakan Propinsi.
- Disnak Kab kota.
- Poskeswan / lab type C.
- Karantina Hewan.
- Lab type B.
- Antar BPPV.
- Lab Refferense (Balitvet,Pusvetma,BPM SOH,AAHL Gelong).
- Kebun Binatang dll.
- Perguruan Tinggi.

2.3 Situasi Penyakit Hewan di wilayah kerja

- Sudah bebas.
- Akan dibebaskan.
- Penyakit Penanganan Prioritas Tinggi.
- Penyakit Penanganan Prioritas Sedang.
- Penyakit Penanganan Prioritas Rendah.

2.4 Kemampuan Total

- SDM (Brain ware)
 - Manajemen dan Organisasi
 - Kemajuan Teknis
- Peralatan Penyakit (Hardware)
- Metode Pengujian (software)
- Sarana dan prasarana Gedung Laboratorium

- Sarana Pendukung (Kendaraan,Hewan Percobaan,Listrik,Sumber air)

2.5 Tugas Pokok dan Fungsi

- Diagnosa
- Surveilans
- Evaluasi Vaksinasi
- Pelayanan Medik Veteriner
- Pemeriksaan Keswan dan Semen
- Pengujian Produk “Food Borne Disease” dan Analisa Resiko
- Analisa Veteriner Terapan
- Sertifikasi Hasil Pengujian
- Saran Teknis
- Pemetaan Penyakit
- Dokumentasi Penyebaran Informasi
- Pelayanan Lab.Keswan dan Kesmavet
- Penyidikan,Pengujian dan Pengamalan Hewan Dan Produk
- Pelaksanaan TU Dan RT Balai

BAB III POTENSI DAN PERMASALAHAN

3.1 Isu Strategis

Balai Veteriner Bukittinggi berada dalam wilayah hot spot (rawan dengan masuknya penyakit eksotik) karena berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu :

- a. Malaysia
- b. Singapore
- c. Thailand
- d. Vietnam

3.2. Kondisi Yang di Harapkan (2015-2019)

- Regional II yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga yang rawan terhadap masuknya penyakit eksotik perlu mendapat perhatian lebih besar dalam pendanaan pengamanan wilayah baik yang diperuntukkan untuk Balai Veteriner Bukittinggi sendiri maupun yang dititipkan melalui Dinas Propinsi Kab/Kota sebagai dana tugas perbantuan.
- Perlu peningkatan kemampuan SDM dan kapasitas infra struktur yang memadai, melalui kerja sama dengan Negara lain (seperti Jepang, Jerman, Australia, Canada, dll) dalam rangka menumbuhkan expertise (keahlian dalam penanganan penyakit menular dan lainnya).
- Perlu didorong melalui suatu kebijakan khusus untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan Program Pasca Sarjana yang selama ini masih sangat lemah dan sedikit.
- Masih kurangnya jumlah pegawai baik Medik Veteriner maupun Paramedik Veteriner, sehingga banyak pegawai yang mempunyai tugas rangkap; yang berakibat kurang tajamnya dan terpenuhi tugas dan fungsi dengan baik.

3.3. Langkah-Langkah Strategis

Dalam rangka pengamanan wilayah dilakukan kerjasama dengan Dinas Propinsi, Kab/Kota terutama dalam :

- Mempertahankan wilayah tetap bebada dari penyakit eksotik
- Mempertahankan wilayah yang sudah dinyatakan bebas (Brucellosis)

- Meningkatkan jumlah penyakit yang dapat dibebaskan dari waktu ke waktu (selanjutnya Hog Cholera)
- Peran Pusat dalam rangka mejembatani kerja sama dengan Negara lain dalam rangka expertise (keahlian) dan pembangunan infrastruktur Balai Veteriner Bukittinggi.
- Meningkatkan pengetahuan SDM melalui magang dan training ke laboratorium.
- melengkapi bahan dan peralatan yang up to date sesuai kemampuan anggaran

3.4. Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan visi dan misi dalam rangka pengamanan wilayah dan melayani kebutuhan aplican perlu ditingkatkan kerjasama per Kabupaten, per Propinsi dan per Regional dengan mempelajari status kondisi daerah dan melakukan koordinasi baik secara resmi berupa rapat koordinasi atau secara personalia.

- Meningkatkan anggaran pengadaan bahan dan alat yang bukan saja penyakit strategis, tapi juga penyakit-penyakit ekonomis
- Melibatkan Balai Veteriner Bukittinggi dalam pengadaan/pemasukan ternak ke dalam wilayah kerja, sehingga penyakit eksotik di Regional II dapat di cegah.

3.5. Hambatan dan Kendala

- Dalam pengujian B Vet Bukittinggi tidak diperbolehkan melakukan pemeriksaan ikan, sedangkan tuntutan masyarakat begitu besar untuk pemeriksaan ikan tersebut, tambahan dari dinas daerah, karena belum ada penyuluhan yang kuat untuk legalistasnya.
- Masih menggantungnya kebijakan keberlangsungan produksi vaksin di Balai Veteriner Bukittinggi.

- Belum terakomodasinya dukungan dana yang memadai untuk pengamanan wilayah terutama dana tugas perbantuan pada Dinas Propinsi /Kab/Kota sehingga coverage sample yang terambil masih dibawah standar yang diharapkan.

3.6. Kondisi Yang Mendukung

Balai Veteriner Bukittinggi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, wilayah kerja meliputi empat Propinsi yaitu Propinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau.

Balai Veteriner Bukittinggi merupakan laboratorium Keswan Type A. Di wilayah kerja Regional II terdapat 4 Laboratorium Type B yaitu di Propinsi Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Propinsi Jambi dan beberapa laboratorium Type C yang berada di Kabupaten, laboratorium Type C yang aktif terdapat di Kabupaten Pasaman Barat (Propinsi Sumatera Barat), Kabupaten Kampar (Propinsi Riau) dan di Tanjung Pinang (Propinsi Kepulauan Riau).

Balai Veteriner Bukittinggi mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner. Dalam melaksanakan Tupoksi Balai Veteriner mempunyai visi dan misi. Visi adalah terwujudnya regional II yang terjamin aman kesehatan hewan dan masyarakat veterinerinya melalui penyidikan pengujian Veteriner yang modern. Misi adalah melaksanakan fungsi Balai Veteriner dengan motivasi kegiatan untuk : a. Mengurangi angka mortalitas; b. Meningkatkan angka kelahiran; c. Meningkatkan produksi daging, susu dan telur yang ASUH. Balai Veteriner Bukittinggi mempunyai Motto : Pelayanan Prima, Cepat, Tepat dan Modern.

Keberhasilan

Kondisi saat ini secara umum baik dan kondusif meliputi beberapa hal sebagai berikut

a. Bersifat Administrasi

Penegak disiplin berjalan dengan baik meliputi :

- Absensi 4 kali perhari, yaitu jam masuk kantor, jam istirahat, jam masuk setelah istirahat dan jam pulang kantor

- Telah disosialisasikan PP No. 51 Tahun 2010 disiplin PNS
- Tingkat kesadaran pegawai pada waktunya sangat baik
- Menerapkan SOP, merupakan acuan dalam melaksanakan langkah-langkah kerja.
- Pemantauan kinerja kelompok/bagian dan staf dengan melakukan rapat mingguan dengan membahas rencana kerja mingguan dan evaluasi kerja mingguan seterusnya.
- Memenuhi kelengkapan reformasi birokrasi dengan menyusun Anjab dan ABK
- Menerapkan SPI dengan dibentuknya Satklak PI, pemantauan dan evaluasi
- Memberikan peluang lebih besar untuk mengikuti pelatihan – pelatihan dan melaksanakan In house training tentang Anjab, ABK, motivasi training, pembuatan Website, Satlak PI, pelatihan ISO 9001: 2008 dll,

b. Bersifat Teknis

1. Mempertahankan Status Akreditasi Lab Pengujian 17025:2005 sebanyak 36 ruang lingkup pengujian, dan ISO:9001 2008
2. Meningkatkan kemampuan SDM melalui :
 - In house Training :
 - a. HPLC
 - b. PCR
 - c. DNA Sequencing
 - d. Elisa
 - e. Kartografi
 - f. dll
 - Pelatihan
 - a. Audit Internal
 - b. Uji Profesiensi
 - c. ISO 9001:2000

3. Penyebaran Teknologi Informasi (TI)

- Biosecurity :
 - Pengamanan lingkungan oleh satpam 24 Jam
 - Pemasangan intruder alarm di dalam kantor dan lab
- Biosafety :
 - Penataan ruang dan alat pengujian sesuai dengan aturan laboratorium
 - Penggunaan alat pelindung diri sebagai pegamanan dalam bekerja, menggunakan PPE, Masker, sarung tangan dll.
 - Pengaturan pembuangan limbah

c. Kegiatan Pengamanan Wilayah

Balai Veteriner Bukittinggi berbatasan dengan Negara-negara lain :

- Meningkatkan kerjasama dengan Propinsi, Kab/Kota
- Mendelegasi metode-metode pengujian yang mutakhir sesuai tuntutan wilayah kerja (Elisa, PMK, PRRS, dll) 1 HK untuk BSE, Rabies dll)
- Tahun 2009 Balai Veteriner Bukittinggi dinyatakan bebas Brucellosis dengan SK Mentan No. 2541/Kpts/PD.610/6/2009, tanggal 15 Juni 2009.
- Tahun 2012 membebaskan penyakit Hog Cholera

d. Hal-hal lain

- Banyaknya tawaran kerjasama dari pihak lain yaitu :
 - a. Politeknik Unand Tj. Pati sudah ada MOU Dirjenmak dengan Direktur Politeknik Unand Tanjung Pati pada Bulan Spetember 2010
 - b. Karantina
 - c. Unand Padang
 - d. Dll.
- Peningkatan SDM melalui pendidikan program Pasca Sarana sangat terbatas

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Veteriner Bukittinggi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Veteriner adalah :

1. Kedudukan

- a. Balai Veteriner Bukittinggi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat dan Pascapanen.
- b. Balai Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala .

2. Tugas

Balai Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengidentifikasian diagnosa, serta pengujian Veteriner dan produk hewan

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diatas, Balai Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerjasama, serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
- c. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
- d. Pelaksanaan surveillan penyakit hewan dan produk hewan;
- e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio dan pelaksanaan diagnosa penyakit hewan;
- f. Pembuatan peta penyakit hewan regional;
- g. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit hewan menular;

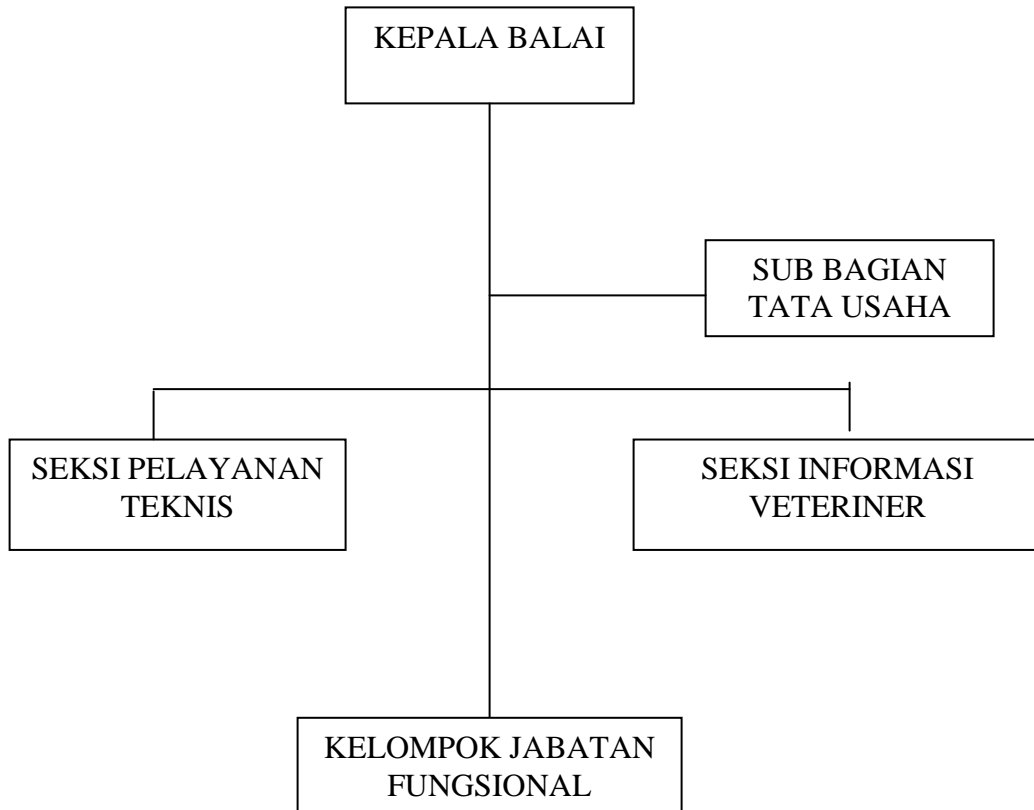
- h. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan/ atau sertifikasi hasil uji;
- i. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
- j. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);
- k. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
- l. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
- m. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- n. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
- o. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan di Regional;
- p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
- r. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk hewan;
- s. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data pengamatan dan pengidentifikasi diagnostik, pengujian veteriner dan produk hewan;
- t. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
- u. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Veteriner.

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi BPPV terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelayanan Teknis
- c. Seksi Informasi Veteriner
- d. Fungsional

**Struktur Organisasi
Balai Penyidikan dan Pengujian Veteriner Regional II Bukittinggi**



4.2. VISI DAN MISI

1. VISI

Melalui Penyidikan dan Pengujian Veteriner yang modern, mewujudkan Regional II terjamin aman kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinerinya.

2. MISI

Melaksanakan fungsi Balai Veteriner dengan memotivasi kegiatan untuk :

- a. Mengurangi angka mortalitas**
- b. Meningkatkan angka kelahiran**
- c. Meningkatkan produksi daging, susu dan telur yang ASUH**

4.3. TUJUAN DAN SASARAN

Untuk menjabarkan visi dan misi Balai Veteriner Bukittinggi melaksanakan kegiatan dan program sebagaimana terlampir dan Kebijakan Teknis Masyarakat Veteriner serta mengacu pada faktor-faktor kunci keberhasilan.

4.4. CARA PENYAMPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi Balai Veteriner Bukittinggi tahun 2015-2019 didasarkan pada upaya pencegahan masalah penyidikan penyakit hewan, pengujian veteriner dan sistem informasi kesehatan hewan dalam rangka era reformasi dan globalisasi untuk mendukung program pembangunan peternakan terutama di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, maka penyusunan program dan kebijakan prioritas dalam Rencana Strategis Balai Veteriner Bukittinggi ini mengacu pada tugas dan fungsi Balai Veteriner sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013, Kebijakan Teknis Kesehatan Nasional, kebijakan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner memasuki era globalisasi dan serta DIK dan DIPA pada Balai Veteriner Bukittinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka penjabaran kebijakan program dan kegiatan Balai Veteriner Bukittinggi dalam upaya pemantapan program pembangunan peternakan sesuai dengan kebijakan kesehatan hewan yaitu diarahkan untuk :

- Penolakan penyakit hewan

- Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan
- Pelayanan kesehatan hewan
- Pengamanan penyakit hewan
- Sistem informasi kesehatan hewan

Sedangkan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner diarahkan untuk :

- Keamanan pangan produk peternakan
- Peduli ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)
- Kesejahteraan hewan

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Meningkatkan kemampuan SDM dibidang Administrasi dan Teknis kegiatan pokok
Output / Pengeluaran
Outcome / Hasil
2. Melakukan revitalisasi sarana dan prasarana jalan komplek, peralatan dan bangunan
3. Melakukan peremajaan (renovasi) dan Pemutakhiran peralatan
4. Meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi
5. Meningkatkan pembebasan penyakit Hog Chollera dan Anthrax
6. Meningkatkan performens pelaporan dan bulletin
7. Meningkatkan kemajuan menyebarkan teknologi informasi
 - Intranet
 - Website

8. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan
 - SMS Centre
 - Kotak saran

Rencana Program dan Kegiatan
Selengkapnya pada lampiran

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Veteriner Bukittinggi Tahun 2015– 2019 adalah dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun, yakni tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang merupakan jabaran dari rencana kerja Direktorat jenderal Peternakan dan Rencana Strategi Kementerian Pertanian.

Rencana Strategis Balai Veteriner Bukittinggi disusun berdasarkan prioritas kegiatan kebutuhan masing masing seksi dan Bagian yang berpedoman kepada Rencana Kerja Dierktorat Jendral Peternakan, dan Rencana Kerja Direktorat Kesehatan Hewan.

Untuk perbaikan dan kesempurnaan Rencana Kerja Balai Veteriner Bukittinggi dilakukan revisi.

LAMPIRAN : MATRIKS : RENCANA STRATEGIS BALAI VETERINER BUKITTINGGI
2015-2019

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Memberikan pelayanan prima Pengujian penyakit- penyakit hewan	Terlaksananya pelayanan prima pengujian penyakit hewan	Terciptanya pelayanan prima Pengujian penyakit hewan	Mengadopsi ISO 9001 : 2008 Dan ISO IEIC 17025:2005	Menetapkan Standar Pelayanan mengikuti kaidah ISO 9001:2008
2. Meningkatkan profesionalisme dalam penyidikan dan survellans	Meningkatn keterampilan profesionalisme	Terbangunnya penyidikan survellans yang handal	Melakukan training nara sumber yang berpengalaman	Menyediakan anggaran untuk mendatangkan narasumber
3. Revitalisasi Sarana pengujian dan kualitas biosafety dan biosecurity	Terbangunnya sarana pengujian yang mandiri dan modern	Terbentuknya laboratorium pengujian yang handal	Melakukan pengadaan peralatan dan membenahi biosafety dan biosecurity	Mengaplikasikan prosedur biosafety dan biosecurity secara dini
4. Memelihara dan meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi	Terpelihara dan meningkatnya ruang lingkup pengujian yang terakreditasi	Bertambahnya ruang lingkup pengujian di masing-masing laboratorium pengujian	Melakukan adopsi metoda yang sesuai dengan alat dan kebutuhan	Memberikan fasilitas kepeluan validasi metoda dan uji profesionalisme
5. Meningkatkan pembinaan laboratorium type B/C	Terbinanya laboratorium type B/C	Bertambahnya kemampuan laboratorium type B/C	Melakukan kunjungan pembinaan laboratorium	Memberikan prioritas kepada laboratorium yang sudah lengkap dan punya komitmen
6. Memelihara dan meningkatkan usaha	Meningkatnya jumlah PHMS yang bebas	Penyakit yang memiliki dampak ekonomi yang besar	Melakukan kerjasama dengan dinas peternakan	Melakukan kajian/analisa dengan bantuanak komisi ahli

pembebasan PHMS			Prop/Kab/Kota	
7. Meningkatkan penggunaan TI dalam sistem pelaporan dan informasi	Terelenggaranya penggunaan TI dalam sistem pelaporan dan informasi	Terciptanya sistem pelayanan TI yang unggul dan bermanfaat bagi dinas/masyarakat	Melakukan pemasangan jaringan LAN dan wifi	Mewajibkan kepada laboratorium untuk memanfaatkan TI dalam penyimpanan data ke pusat akses data (infovet)
8. Meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait untuk pengamanan wilayah penyakit hewan	Meningkatnya kerjasama dengan dinas terkait dalam pengamanan wilayah penyakit hewan	Terselenggaranya wilayah yang aman terhadap ancaman penyakit hewan	Melakukan koordinasi dengan dinas Prop/Kab/Kota	Membuat forum-forum pertemuan dan kunjungan wilayah
9. Memotifasi dinas untuk mengurangi angka kematian pedet dan meningkatkan angka kelahiran pedet	Terbangunnya kerjasama dalam pengamanan pedet dan pengamana daging ASDH	Terciptanya kemitraan dalam usaha penanggulangan kematian pedet dan pengamanan daging asuh	Melakukan opsional penanganan penyakit hewan kelapangan secara massal dalam mengurangi angka kematian pedet	Melakukan sharing dana dalam menggalang kekuatan pengamanan untuk wilayah yang lebih luas

Lampiran 2: Rencana Pengembangan Pengujian

NO	NAMA PENYAKIT	METODE YANG DIPAKAI			
		SAAT INI	RENCANA PENGEMBANGAN		
			2015-2016	2018	2019
1	Brucellosis	RBPT - CFT	RBPT- CFT, Kultur, ELISA, PCR	RBPT- CFT, Kultur, ELISA, PCR	RBPT- CFT, Kultur, ELISA, PCR
2	Anthrax	Ascoli Test, Biologis, Kultur, Elisa	ELISA, PCR	ELISA, PCR	ELISA, PCR
3	SE	Kultur, Biologis, PMPT	ELISA	ELISA, PCR	ELISA, PCR
4	Salmonellosis	Kultur,ELISA	Kultur, ELISA, PCR	Kultur,ELISA, PCR	Kultur,ELISA, PCR
5	Rabies	Seller's, FAT, ELISA,PCR	Seller's, FAT, ELISA,PCR, Tissue Culture, IHK, Immunoperoxidase	Seller's, FAT, ELISA,PCR, Tissue Culture, IHK, Immunoperoxidase	Seller's, FAT, ELISA,PCR, Tissue Culture, IHK, Immunoperoxidase
6	Hog Cholera	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase
7	ND	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, Tissue Culture, PCR	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, Tissue Culture, Immunoperoxidase, PCR	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, Tissue Culture, Immunoperoxidase, PCR
8	Jembrana	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture.	ELISA, PCR, Tissue Culture.	ELISA, PCR, Tissue Culture.
9	IBD (Gumboro)	Belum Ada	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase
10	IBR	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase
11	BVD	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture.	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase
12	AI	ELISA, Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio	ELISA, Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, IHK PCR, DNA Sequencing	ELISA, Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, IHK PCR, DNA Sequencing	A Sequencing

LAMPIRAN : MATRIKS : RENCANA STRATEGIS BALAI VETERINER BUKITTINGGI 2015-2019

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Memberikan pelayanan prima Pengujian penyakit- penyakit hewan	Terlaksananya pelayanan prima pengujian penyakit hewan	Terciptanya pelayanan prima Pengujian penyakit hewan	Mengadopsi ISO 9001 : 2008 Dan ISO IEIC 17025:2005	Menetapkan Standar Pelayanan mengikuti kaidah ISO 9001:2008
2. Meningkatkan profesionalisme dalam penyidikan dan survellans	Meningkatn keterampilan profesionalisme	Terbangunnya penyidikan survellans yang handal	Melakukan training nara sumber yang berpengalaman	Menyediakan anggaran untuk mendatangkan narasumber
3. Revitalisasi Sarana pengujian dan kualitas biosafety dan biosecurity	Terbangunnya sarana pengujian yang mandiri dan modern	Terbentuknya laboratorium pengujian yang handal	Melakukan pengadaan peralatan dan membenahi biosafety dan biosecurity	Mengaplikasikan prosedur biosafety dan biosecurity secara dini
4. Memelihara dan meningkatkan jumlah ruang lingkup pengujian yang terakreditasi	Terpelihara dan meningkatnya ruang lingkup pengujian yang terakreditasi	Bertambahnya ruang lingkup pengujian di masing-masing laboratorium pengujian	Melakukan adopsi metoda yang sesuai dengan alat dan kebutuhan	Memberikan fasilitas kepeluan validasi metoda dan uji profesionalisme
5. Meningkatkan pembinaan laboratorium type B/C	Terbinanya laboratorium type B/C	Bertambahnya kemampuan laboratorium type B/C	Melakukan kunjungan pembinaan laboratorium	Memberikan prioritas kepada laboratorium yang sudah lengkap dan punya komitmen
6. Memelihara dan	Meningkatnya	Penyakit yang memiliki	Melakukan	Melakukan kajian/analisa

meningkatkan usaha pembebasan PHMS	jumlah PHMS yang bebas	dampak ekonomi yang besar	kerjasama dengan dinas peternakan Prop/Kab/Kota	dengan bantuak komisi ahli
7. Meningkatkan penggunaan TI dalam sistem pelaporan dan informasi	Terelenggaranya penggunaan TI dalam sistem pelaporan dan informasi	Terciptanya sistem pelayanan TI yang unggul dan bermanfaat bagi dinas/masyarakat	Melakukan pemasangan jaringan LAN dan wifi	Mewajibkan kepada laboratorium untuk memanfaatkan TI dalam penyimpanan data ke pusat akses data (infovet)
8. Meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait untuk pengamanan wilayah penyakit hewan	Meningkatnya kerjasama dengan dinas terkait dalam pengamanan wilayah penyakit hewan	Terselenggaranya wilayah yang aman terhadap ancaman penyakit hewan	Melakukan koordinasi dengan dinas Prop/Kab/Kota	Membuat forum-forum pertemuan dan kunjungan wilayah
9. Memotifasi dinas untuk mengurang angka kematian pedet dan meningkatkan angka kelahiran pedet	Terbangunnya kerjasama dalam pengamanan pedet dan pengamana daging ASDH	Terciptanya kemitraan dalam usaha penanggulangan kematian pedet dan pengamanan daging asuh	Melakukan opersional penanganan penyakit hewan kelapangan secara massal dalam mengurangi angka kematian pedet	Melakukan sharing dana dalam menggalang kekuatan pengamanan untuk wilayah yang lebih luas

**12 PENYAKIT STRATEGIS
BPPV REGIONALII BUKITTINGGI**

NO	NAMA PENYAKIT	METODE YANG DIPAKAI			
		SAAT INI	RENCANA PENGEMBANGAN		
			2012	2013	2014
1	Brucellosis	RBPT - CFT	RBPT- CFT, Kultur, ELISA, PCR	RBPT- CFT, Kultur, ELISA, PCR	RBPT- CFT, Kultur, ELISA, PCR
2	Anthrax	Ascoli Test, Biologis, Kultur, Elisa	ELISA, PCR	ELISA, PCR	ELISA, PCR
3	SE	Kultur, Biologis, PMPT	ELISA	ELISA, PCR	ELISA, PCR
4	Salmonellosis	Kultur,ELISA	Kultur, ELISA, PCR	Kulultur,ELISA, PCR	Kultur,ELISA, PCR
5	Rabies	Seller's, FAT, ELISA,PCR	Seller's, FAT, ELISA,PCR, Tissue Culture, IHK, Immunoperoxidase	Seller's, FAT, ELISA,PCR, Tissue Culture, IHK, Immunoperoxidase	Seller's, FAT, ELISA,PCR, Tissue Culture, IHK, Immunoperoxidase
6	Hog Cholera	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase
7	ND	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, Tissue Culture, PCR	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, Tissue Culture, Immunoperoxidase, PCR	Hemaglutinasi Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, Tissue Culture, Immunoperoxidase, PCR
8	Jembrana	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture.	ELISA, PCR, Tissue Culture.	ELISA, PCR, Tissue Culture.
9	IBD (Gumboro)	Belum Ada	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase

10	IBR	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase
11	BVD	ELISA, PCR	ELISA, PCR, Tissue Culture.	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase	ELISA, PCR, Tissue Culture, Immunoperoxidase
12	AI	ELISA, Hemagglutination Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio	ELISA, Hemagglutination Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, IHK PCR, DNA Sequencing	ELISA, Hemagglutination Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, IHK PCR, DNA Sequencing	ELISA, Hemagglutination Inhibition, Inokulasi pada Telur Berembrio, IHK PCR, DNA Sequencing

Bukittinggi, 20 Januari 2015

Kepala BPPV Reg. II
Bukittinggi

Drh. H. Azfirman

